



**PEMERINTAH PROVINSI  
JAMBI**

---

# **LAPORAN KINERJA (LKj) PEMERINTAH (Revisi)**

---

**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI**

Jalan Jend. A. Thalib No. 45  
Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 62695  
Fax (0741) 62751

**2022**

## Kata Pengantar

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKj Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jambi, 30 Maret 2023  
Kepala Dinas,  
  
ARIEF MUNANDAR, SE  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670307 199903 1 004

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan indikator Persentase Penurunan Jumlah PPKS mencapai 78 %,
2. **Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial** dengan indikator Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial mencapai 77,05 %
3. **Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan indikator Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial mencapai 149,53 %
4. **Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** dengan indikator Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif mencapai 100,05 %
5. **Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan** dengan indikator Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan mencapai 100%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangannya perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi kedepan, sebagai berikut:

1. Perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta UPTD Lingkup Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi serta stakeholder yang terkait.
2. Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial
3. Memaksimalkan perencanaan dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
BAB 1 .....	1
1.1. Struktur Organisasi .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi .....	2
1.3 Isu-isu Strategis .....	4
1.4 Keadaan Pegawai.....	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	9
1.6. Keuangan .....	10
1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	11
BAB 2.....	12
2.1. Perencanaan Strategis .....	12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan .....	16
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	18
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	20
2.3.1. Target Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi .....	21
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	21
2.4. Instrumen Pendukung.....	23
BAB 3.....	24
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	24
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	25
BAB 4 Penutup.....	33

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 20..

Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pns Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi (Menurut Kepangkatan) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	7
Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	9
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026.....	13
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 .....	14
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022.....	21
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi.....	22
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	25
Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1 .....	26
Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 1.....	26
Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 2.....	27
Tabel 3.4.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial 2.....	27
Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 3.....	28
Tabel 3.5.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.....	28
Tabel 3.6 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 4.....	29
Tabel 3.6.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 4 .....	29
Tabel 3.7 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 5.....	30
Tabel 3.7.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan .....	30
Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	31
Tabel 3.10 Analisis efisiensi Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	31



## BAB 1

### Pendahuluan

BAB I berisi :

Struktur Organisasi  
Fungsi dan Tugas  
Isu-Isu Strategis  
Keadaan Pegawai  
Keadaan Sarana  
dan Prasarana  
Keuangan  
Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

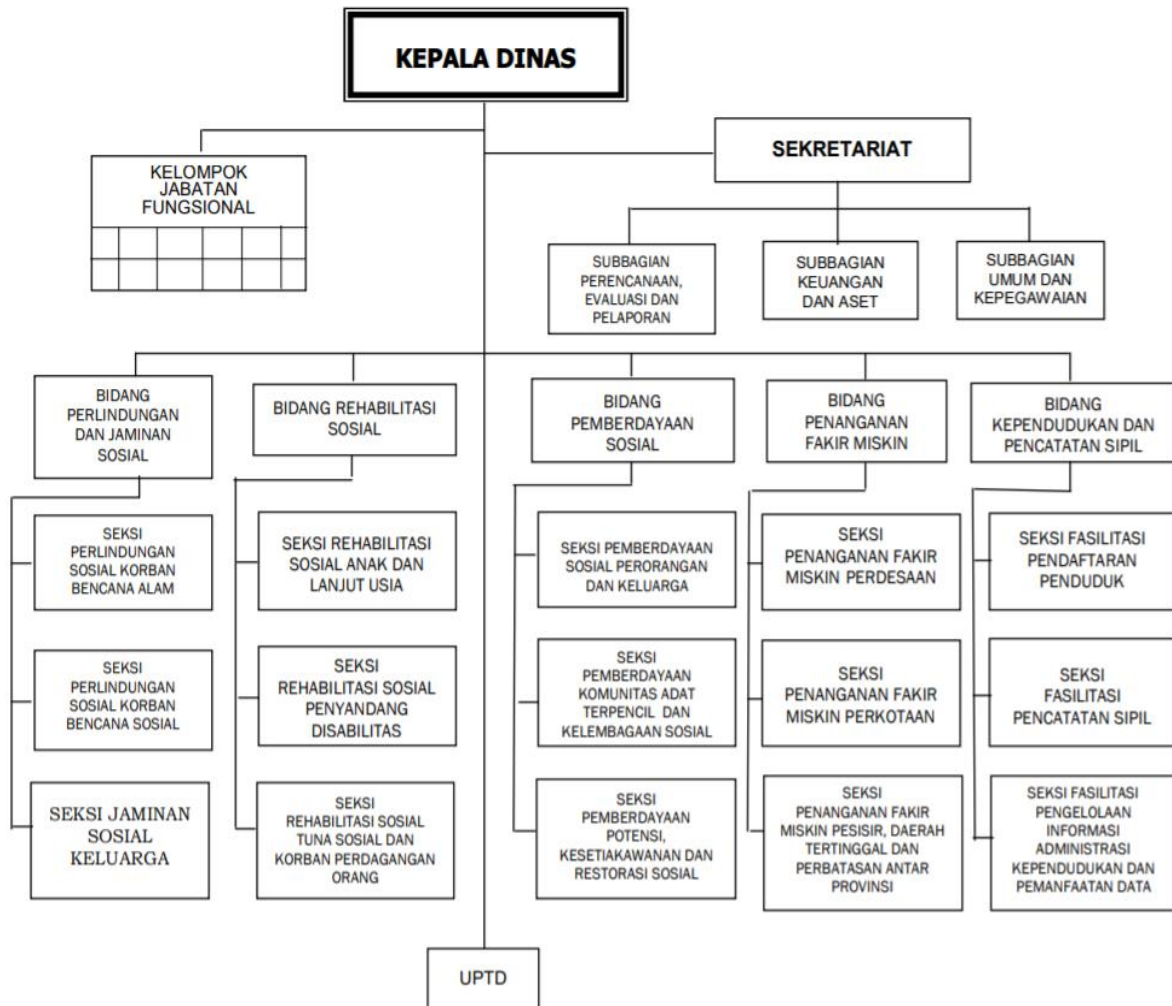
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Jambi didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 1.1. Struktur Organisasi

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi**



Pelaksanaan anggaran dan upaya pencapaian target, tujuan dan sasaran pada tahun 2022 menggunakan struktur Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, kependudukan dan pencatatan



sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan operasional pelaksanaan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang penanganan fakir miskin dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan pelayanan teknis operasional di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;
3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dukungan administrasi, dan kerjasama kepada seluruh unsur satuan organisasi di lingkungan dinas;
5. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas yang membidangi sosial di kabupaten/kota;
6. Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak factor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah Kinerja, dan yang kedua adalah Manajemen Kinerja.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup PSKS ( Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ) Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah dinamika Data PPKS ( Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ).

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan, antara lain, dimaksudkan agar perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi memberikan pelayanan kedalam secara internal, yaitu pelayanan aparatur maupun pelayanan publik kepada masyarakat umum antara lain melalui pelayanan UPT Panti. Untuk membantu menjalankan operasional kegiatan tersebut didukung pula oleh Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dan tenaga non PNS dari berbagai disiplin ilmu.

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, beberapa permasalahan yang menghambat kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

- a. Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan fungsi Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masih perlu ditingkatkan, seperti Lulusan STKS yang terbatas di UPT Panti, Minimnya bintek dan diklat yang diikuti pejabat Fungsional. Demikian pula belum adanya tenaga Administrator Database (ADB) di Provinsi untuk urusan dukcapil.
- b. Prasarana UPT Panti milik pemerintah provinsi yang umumnya dibangun pada tahun 1980 an, sangat perlu untuk direhab secara bertahap. Seperti Atap di Panti Sosial; Tresna Werdha (PSTW) Budi Luhur yang 70 persen masih asbes.
- c. Sarana yang masih minim dan perlu ditingkatkan. Seperti Televisi, Komputer, Sound System yang memadai dan sebagainya.

d. Update dan Validasi data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) termasuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus terus ditingkatkan. Dimana komitmen, penganggaran kabupaten/kota dalam Update dan Validasi data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) termasuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) masih bervariasi. Ada yang tiap tahun menganggarkan, ada pula yang belum menganggarkan.

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

### **Gambaran pelayanan perangkat daerah**

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mendukung tugas Pemerintah Provinsi Jambi di bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi pelayanan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi antara lain:

1. menyediakan prasarana dan sarana Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan fungsi pelayanan ini, faktor-faktor yang sering mempengaruhi fungsi pelayanan antara lain:

1. perumusan kebijakan anggaran dan regulasi;
2. SDM Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. standar mutu layanan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, Advokasi dan Rehabilitasi, serta persentase PSKS yang aktif

Kedua Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### **1.4 Keadaan Pegawai**

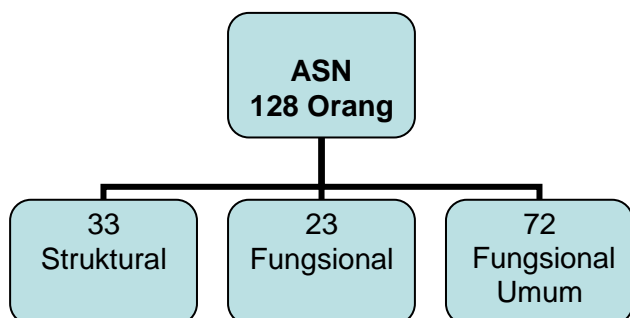
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dan Tugas Pembantuan Yang ditugaskan Kepada Daerah Provinsi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi Jambi didukung sumber daya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi) dan UPTD (UPT Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Budi Luhur dan UPTD Panti Sosial Bina Anak, Wanita Dan Eks Psikotik (PSBAWEP) Harapan Mulya.

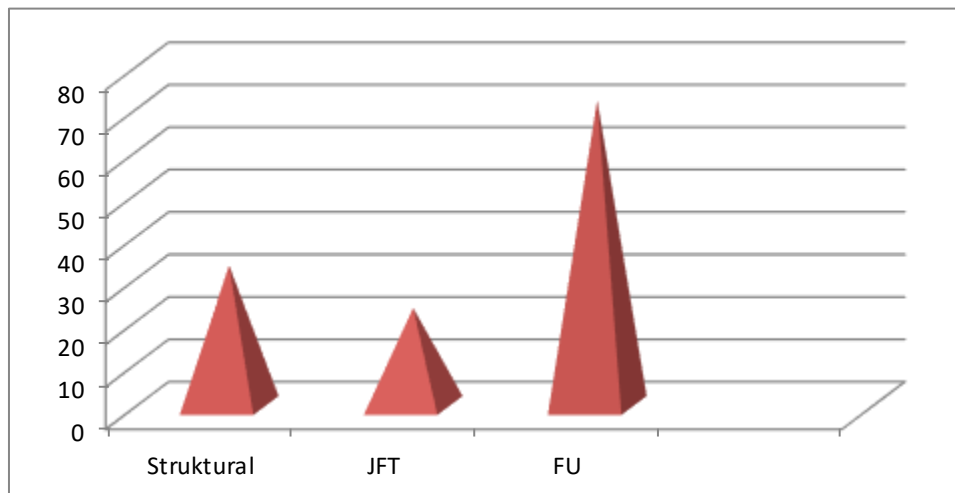
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi pegawai di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 128 pegawai yang terdiri 33 pejabat struktural, 23 pejabat fungsional tertentu, dan 72 pejabat fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **128 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :



**Gambar 1.2. Grafik Jumlah ASN Tahun 2022**

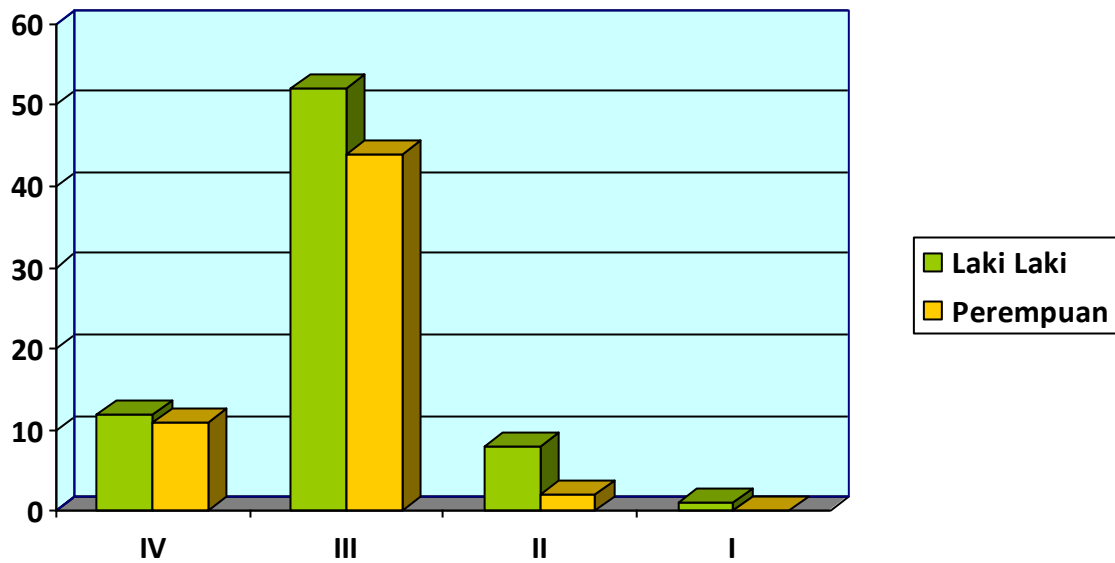


Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa Di Dinas SosialDukcapil Provinsi Jambi terdapat pegawai yang dominan adalah Fungsional Umum dibandingkan Jabatan Fungsional Tertentu dan diharapkan dapat memberikan kinerja secara maksimal.

**TABEL 1.1.  
JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI  
(MENURUT KEPANGKATAN)**

Golongan	Pangkat	Ruang	Jenis Kelamin		Ket
			L	P	
IV	Pembina Utama	IV /e	0	0	Orang
	Pembina Utama Madya	IV /d	1	1	Orang
	Pembina Utama Muda	IV /c	1	1	Orang
	Pembina Tk. I	IV /b	8	3	Orang
	Pembina	IV /a	13	7	Orang
III	Penata Tk. I	III /d	44	26	Orang
	Penata	III /c	15	6	Orang
	Penata Muda Tk. I	III /b	29	16	Orang
	Penata Muda	III /a	8	4	Orang
II	Pengatur Tk. I	II /d	3	2	Orang
	Pengatur	II /c	1	1	Orang
	Pengatur Muda Tk. I	II /b	2	1	Orang
	Pengatur Muda	II /a	2	2	Orang
I	Juru Tk. I	I /d	2	1	Orang
	Juru	I /c	1	1	Orang
	Juru Muda Tk. I	I /b	0	0	Orang
	Juru Muda	I /a	0	0	Orang
Jumlah		128	71	57	Orang

**Gambar 1.2. Grafik ASN berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2022**



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pegawai di Dinas SosialDukcapil Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

**TABEL 1.2.**  
**JUMLAH PNS DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI**  
**(MENURUT JENJANG PENDIDIKAN)**

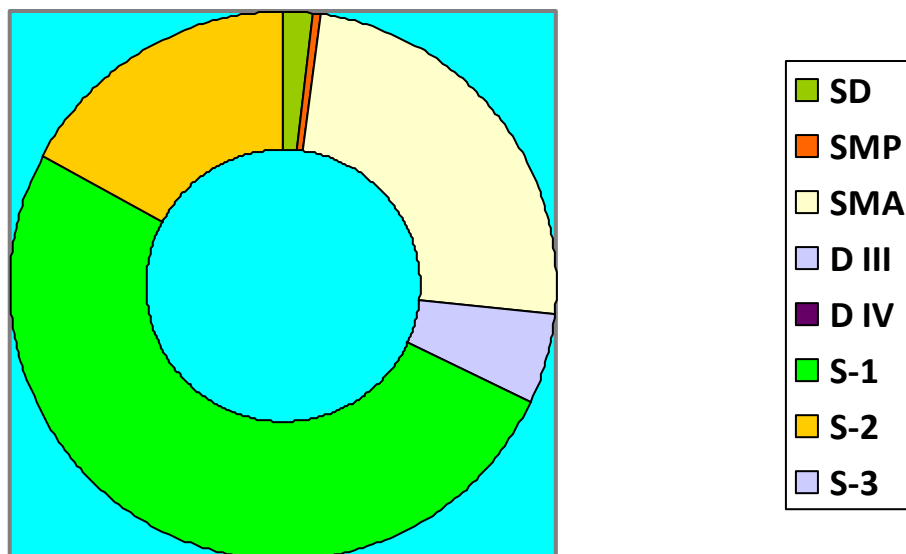
Tingkat Pendidikan	Banyaknya
Sekolah Dasar	2 orang
Sekolah Menengah Pertama	1 orang
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	31 orang
Diploma 1	0 orang
Diploma 2	0 orang
Diploma 3	7 orang
Diploma 4	0 orang
S-1	65 orang
S-2	22 orang
S-3	0 orang
<b>Jumlah</b>	<b>128 orang</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2022

**Gambar 1.3. Diagram ASN berdasarkan pangkat dan golongan Tahun 2022**

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pegawai di Dinas Sosial Dukcapil

Provinsi Jambi sebagian besar berada pada jenjang pendidikan S1.



### 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruangrapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi sejauh ini di rasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yangdimiliki berada dalam kondisibaik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Daftar Sarana dan Prasarana  
Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022**

NO.	JENIS BARANG / NAMA BARANG	JUMLAH
A.	<b>I. BANGUNAN DAN GEDUNG DINAS</b>	
	1. Gedung Kantor Dinas Sodikapil Provinsi Jambi	8 Unit
	2. Rumah Dinas (Kepala)	1 Unit
	3. Pos Jaga	1 Unit
	4. Gudang	2 Unit
	5. Mushola	1 Unit
	6. Parkir	3 Unit
	<b>II. PSBAWEP</b>	
	1. Gedung Kantor	9 Unit
	2. Mushola	2 Unit
	3. Aula	2 Unit
	4. Wisma	11 Unit
	5. Rumah Dinas	4 Unit
	6. Asrama	5 Unit

	<b>III. PSTW</b>	
	1. Gedung Kantor	1 Unit
	2. Mushola	1 Unit
	3. Aula	1 Unit
	4. Wisma	14 Unit
	5. Rumah Dinas	7 Unit
	6. Garasi	1 Unit
	7. Gedung Klinik	1 Unit
	8. Dapur	1 Unit
<b>B.</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
	1. Alat Angkutan Kendaraan Roda 4	14 Unit
	2. Alat Angkutan Kendaraan Roda 2	12 Unit
	3. Alat-alat Bengkel dan Alat-alat Ukur	13 Unit
	4. Alat Kantor dan Rumah Tangga	2389 Unit
	5. Alat Studio dan Komunikasi	33 Unit
	6. Alat-alat Kedokteran	37 Unit
	7. Alat-alat Laboratorium	37 Unit
	8. Alat-alat Keamanan	1 Unit
	9. Alat Olahraga	2 Unit

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

## 1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi pada tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar 42.783.072.921,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.611.389.695,- dan belanja langsung sebesar Rp.26.171.683.695,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 26.171.683.695,- Yang didukung oleh 11 program dan 25 kegiatan.



## **1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **\* RINGKASAN EKSEKUTIF**

Ringkasan Eksekutif, memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **\* BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistemati kapenulisan LKjIP.

### **\* BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### **\* BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

### **\* BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah. LAMPIRAN

## BAB 2

### Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Rencana Anggaran Tahun 2022
4. Instrumen Pendukung

#### 2.1. Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi

perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jambi.

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2021, Renstra Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

##### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu tahun 2021 – 2026. Dinas Sosial Provinsi Jambi mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Jambi maupun dalam

upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Adapun Visi Gubernur Jambi tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Provinsi Jambi Lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”**, dengan Misi yaitu :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

**Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026**

<b>Visi: “ Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”</b>					
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>1.</b>	Memantapkan tata kelola Pemerintahan	terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
				<b>Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima</b>	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
					Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
					<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>
<b>2.</b>	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sektor Pertanian, Sosial Dukcapil dan Perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industri pengolahan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB
				Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
				<b>memantapkan</b>	Rasio Konektivitas

				<b>kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar</b>	Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2 eq)
			Tingkat kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka
3.	Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik,sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan
				Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses terhadap Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender

Sumber:RPJMDProvinsi Jambi 2021-2026

Sebagai implementasi Visi dan Misi Gubernur Jambi tersebut diterjemahkan dalam tataran pelaksanaan di Organisasi Perangkat Daerah Rentsra Dinsos Dukcapil Jambi 2021-

2026 dalam bentuk sasaran strategi Dinas Sosial Dukcapil. Sebagai OPD teknis Dinas sosial dukcapil Provinsi Jambi juga merumuskan kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan Visi dan Misi Gubernur tersebut.

Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dukcapil Provinsi Jambi dan Indikatornya, yaitu:

Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar, dengan indicator: Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial.

Secara lengkap terlihat dari, tabel berikut :

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial		0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM.		1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
2	memantapkan Tata kelola Pemerintah.	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dan pelayan publik yang prima.	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil.		0,94	0,95	0,96	0,97	0,98

			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan.		99 persen	99 persen	99 persen	99 persen	99 persen
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan.		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
			Persentase Pengeluaran Profil Kependudukan.		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah:

#### A. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi Dan Indikatornya

- 1 Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan Indikator : % PMKS yang meningkat kemampuan fungsi sosialnya.
- 2 Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan Indikator : % PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### B. Sasaran Strategi Jangka Menengah

Adapun Sasaran Strategis yang Dinas Sosial Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- c. Meningkatnya perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

#### C. Indikator

- 1 Indikator Sasaran Strategis : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah :

- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan fungsi sosialnya.
- 2 Indikator sasaran Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Indikator Meningkatnya perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah
- Persentase perekaman dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Baseline 2021	Target tahunan					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	0,5%	0,50%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	25%	25%	40%	40%	40%	40%	40%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana sesuai SPM	31,73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan	2,50%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%

		Perlindungan dan Jaminan Sosial							
2	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Program Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	5,00%	5,00%	7,50%	8,00%	8,00%	8,50%	8,50%
3	Meningkatnya Cakupan Penduduk Wajib Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	93%	94%	95%	96%	97%	98%	98%
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Pengelolaan Profile kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,09%	83,50%	84,00%	84,50%	85,30%	86,00 %	86,00%
		Predikat AKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A

### 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut :



**Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

<b>VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT</b>			
<b>MISI I : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan public berkualitas	Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan public yang prima	Peningkatan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah	Meningkatnya kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah
<b>MISI II : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial

2.2. Perjanjian KinerjaTahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,indicator kinerja,beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	5,17 %
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	292 Orang
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.595 Orang
4	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif	1.850 Orang
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan	Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	9 OPD

Sumber: Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.,2022

2.3. Anggaran Tahun 2022

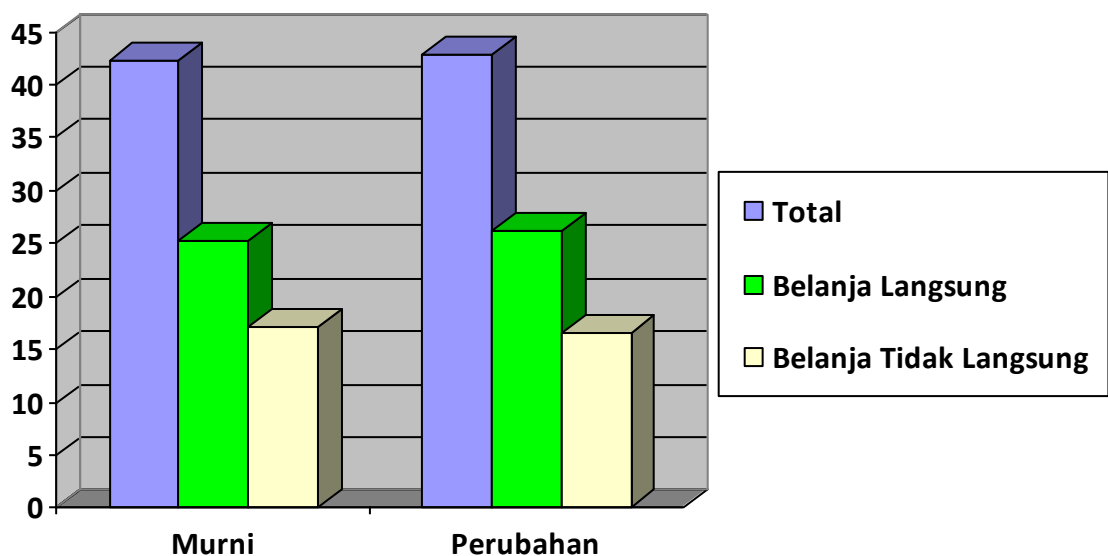
Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp, **42.783.072.921,00** dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. **16.611.389.226,00** dan Belanja Langsung Rp. **26.171.683.695,00**

Tabel 2.3.1

Pagu Anggaran Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	
		Murni	Perubahan
1	Belanja Langsung	25.169.199.485,00	26.171.683.695,00
2	Belanja Tidak Langsung	17.173.683.524,00	16.611.389.226,00
Jumlah Total		42.342.883.009,00	42.783.072.921,00

Gambar 2.1 Anggaran Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Jambi



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, diketahui bahwa Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mendapatkan penambahan pagu pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. **440.189.999,00**

### 2.3.1. Target Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp 42.783.072.921,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 16.428.580.247,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 26.354.492.674,-.

**Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022**

No	Jenis Belanja	Pagu		Realisasi	
		Murni	Perubahan	Keu	Fisik
1	Belanja Langsung	25.169.199.485,00	26.171.683.695,00	91.29%	99.98 %
2	Belanja Tidak Langsung	17.173.683.524,00	16.611.389.226,00	98.90%	100 %
Jumlah Total		42.342.883.009,00	42.783.072.921,00	94.25%	99.99%

### 2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

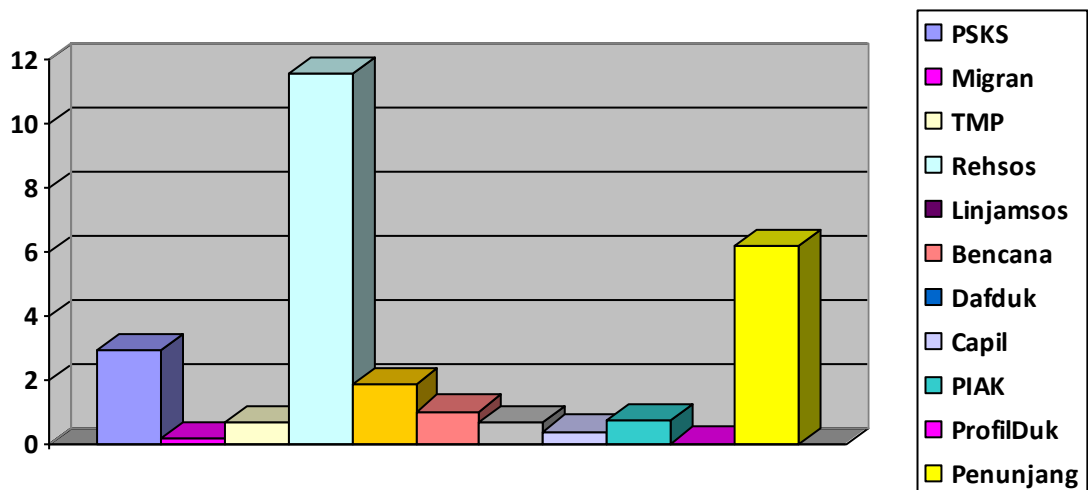
Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi**

No.	Sasaran	Anggaran ( Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	11.572.403.441,00	43,91%	Program Rehabilitasi Sosial
		190.000.000,00	0,72%	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
		1.019.659.720,00	3,87%	Program Penanganan Bencana
		1.880.786.109,00	7,14%	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
2	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Penyelenggara Program Kesejahteraan Sosial	2.952.085.669,00	11,20%	Program Pemberdayaan Sosial
		659.620.058,00	2,50%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
3	Meningkatnya Cakupan Penduduk Wajib Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)	398.571.856,00	1,51%	Program Pencatatan Sipil
		697.788.778,00	2,65%	Program Pendaftaran Penduduk
		745.630.166,00	2,83%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		28.037.747,00	0,11%	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	6.027.100.151,00	23,56%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jumlah		26.171.683.695,00	100%	

Sumber:Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi, 2022

**Gambar 2.2 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi**



## 2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa system informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

- Bab 3 berisi :
- 1. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
  - 2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
  - 3. *Realisasi Anggaran*

### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE WARNA
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	%	5,17 %	4,04 %	78 %	Tinggi Hijau Muda
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	Orang	292 Orang	225 Orang	77,05 %	Tinggi Hijau Muda
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	1.595 Orang	2.385 Orang	149,53 %	Sangat Baik Hijau Tua
4	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif	Orang	1.850 Orang	1.851 Orang	100,05 %	Sangat Baik Hijau Tua
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan	Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	OPD	9 OPD	9 OPD	100 %	Sangat Baik Hijau Tua

Sumber : Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, 2022

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Pada Tahun 2022, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (tercapai  $\geq 100$  %) dari total indikator dengan persentase capaian melampaui dari target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: **Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan indikator kinerjanya yakni **Persentase Penurunan Jumlah PPKS**

Sasaran ini dicapai melalui Program Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan dan Jamninan Sosial, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Dalam Panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Tabel 3.3 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE WARNA
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	%	5,17 %	4,04 %	78 %	Tinggi Hijau Muda

Sasaran Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Persentase Penurunan Jumlah PPKS telah memenuhi sasaran dengan jumlah target 5,17% dan realisasi 4,04% sehingga persentase capaian sebesar 78% . Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2021-2022

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	3,07 %	3,59 %	5,17 %	4,04 %	78 %

Sumber : Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi

Tahun 2020 Jumlah Persentase Penurunan Jumlah PPKS adalah sebesar 3,07%, di Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 3,59 %, dan di Tahun 2022 persentase penurunan jumlah PPKS meningkat menjadi 4,04 %.

Sasaran #2: **Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial** dengan indikator kinerjanya yakni **Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial**

Sasaran ini dicapai melalui Program Pemberdayaan Sosial, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:



- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di dalam panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar di Dalam Panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

**Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE WARNA
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	Orang	292 Orang	225 Orang	77,05 %	Tinggi Hijau Muda

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan indikator Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan jumlah target 292 Orang dan realisasi 225 Orang sehingga persentase capaian sebesar 77,05 % . Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial 2021-2022**

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	240 Orang	290 Orang	292 Orang	225 Orang	77,05 %

Sumber : Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi

Tahun 2020 Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial adalah sebanyak 240 Orang, di Tahun 2021 terjadi penambahan menjadi 290 Orang, dan di Tahun 2022 Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial menurun menjadi 225 Orang.

Sasaran #3: **Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan indikator kinerjanya yakni **Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Sasaran ini dicapai melalui Program Perlindungan Jaminan Sosial, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE WARNA
1	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	1.595 Orang	2.385 Orang	149,53 %	Sangat Baik Hijau Tua

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan jumlah target 1.595 Orang dan realisasi 2.385 Orang sehingga persentase capaian sebesar 149,53 % . Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial 2020-2022

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.000 Orang	30.030 Orang	1.595 Orang	2.385 Orang	149,53 %

Sumber : Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi

Tahun 2020 Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial adalah sebanyak 30.000 Orang yang terdampak Covid-19 dengan bantuan berupa Bantuan Lansung Tunai (BLT). di Tahun 2021 terjadi penambahan menjadi 30.030 Orang yang terdiri dari bantuan terdampak Covid-19 sebanyak 30.000 Orang dan penerima bantuan KUBE sebanyak 3 Kelompok atau 30 Orang. Adapun di Tahun 2022 Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial sebanyak 2.385 Orang.

Sasaran #4: **Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**dengan indikator kinerjanya yakni **Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif**

Sasaran ini dicapai melalui Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Tabel 3.6 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE WARNA
1	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif	Orang	1.850 Orang	1.851 Orang	100,05 %	Sangat Baik Hijau Tua

Sasaran Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan jumlah target 1.850 Orang dan realisasi 1.851 Orang sehingga persentase capaian sebesar 100,05 % . Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2020-2022

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif	1.839 Orang	1.847 Orang	1.850 Orang	1.851 Orang	100,05 %

Sumber : Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi

Tahun 2020 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif adalah sebanyak 1.839 Orang, di Tahun 2021 terjadi penambahan menjadi 1.847 Orang, dan di Tahun 2022 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 1.851 Orang.

Sasaran #5: **Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan** dengan indikator kinerjanya yakni **Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan**

Sasaran ini dicapai melalui Program Pencatatan Sipil, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
- Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
- Pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Penyediaan Profil Kependudukan

**Tabel 3.7 Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE WARNA
1	Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan	Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	OPD	9 OPD	9 OPD	100 %	Sangat Baik Hijau Tua

Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan dengan jumlah target 9 OPD dan realisasi 9 OPD sehingga persentase capaian sebesar 100 % . Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7.1 Capaian Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan 2020-2022**

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	7 OPD	7 OPD	9 OPD	9 OPD	100 %

*Sumber : Dinas Sosialdukcapil Provinsi Jambi*

Tahun 2020 dan 2021 Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan adalah sebanyak 7 OPD, dan Tahun 2022 terjadi penambahan Jumlah Stakeholder menjadi 9 OPD.

**3.3. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp.23.892.499.687,84 (91,29%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 26.171.683.695,-. Realisasi anggaran untuk program atau kegiatan utama sebesar Rp. 40.320.980.934,84 (94,25%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.428.580.247,- (98,90%);
- 2. APBD Belanja langsung sebesar Rp. 23.892.400.687,84 (91,29%);

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran  
Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022**

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Satuan	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	%	5,17 %	4,04 %	14.662.849.270	13.329.737.479,84	91,47%
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	Orang	292 Orang	225 Orang	11.572.403.441	10.451.128.291,84	90,31%
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Orang	1.595 Orang	2.385 Orang	3.090.445.829	2.878.609.188	92,64%
4	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif	Orang	1.850 Orang	1.851 Orang	3.611.705.727	3.416.063.209	95,04
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan	Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	OPD	9 OPD	9 OPD	1.870.028.547	1.604.004.102	85,98
Belanja langsung						26.171.683.695	23.892.400.687,84	91,29%
Belanja tidak langsung						16.611.389.226	16.428.580.247	98,90%
<b>Total Belanja</b>						42.783.072.921	40.320.980.934,84	94,25%

Sumber : Dinas Sosial Dukcapil, 2022

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Analisis efisiensi Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100% )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	78 %	91,47%	-13,47 %
2	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	77,05 %	90,31%	-13,26 %

3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	149,53 %	92,64%	56,89 %
4	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif	100,05 %	95,04	5,01 %
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan	Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan	100 %	85,98	14,02 %

Sumber : Dinas Sosial Dukcapil, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk target Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial target tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena peningkatan target tersebut tidak didukung dengan peningkatan anggaran yang semestinya menyesuaikan peningkatan target. Misal target anak terlantar bertambah dari 25 pada tahun 2021 menjadi 50 klien pada tahun 2022, sementara anggaran yang ada masih untuk 25 klien. Begitu juga dengan kegiatan disabilitas mental yang targetnya meningkat dari 125 pada tahun 2021 menjadi 150 pada tahun 2022. Sementara anggaran yang tersedia hanya untuk 125 klien.

Sedangkan untuk ketiga sasaran lainnya, yaitu Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan telah melebihi target. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi penggunaan alokasi anggaran dalam memenuhi capaian kinerja.

### ANALISIS EFISIENSI

Berdasarkan tabel diatas, kinerja sasa/ran strategis Dinas Sosial Kependudukan dan Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 49,19%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan saranaprasarana.

Sistem penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Output yang baik akan memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik, sementara output yang buruk akan berakibat pada tidak optimalnya hasil sehingga belanja yang dikeluarkan pun tidak efektif. Selain itu, output yang baik adalah output yang disusun atas dasar analisis kebutuhan.

## BAB 4

Bab 4 berisi :

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut

### Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Sosial Dukcapil pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Dukcapil Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial Dukcapil tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis, terlihat bahwa sasaran perangkat daerah, yaitu:
  - **Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** dengan indikator Persentase Penurunan Jumlah PPKS mencapai 78 %,
  - **Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial** dengan indikator Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial mencapai 77,05 %
  - **Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan indikator Jumlah PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial mencapai 149,53 %
  - **Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** dengan indikator Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif mencapai 100,05 %
  - **Meningkatnya Pemanfaatan Kepemilikan Kependudukan** dengan indikator Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Dokumen Kependudukan mencapai 100%
2. Realisasi kinerja Dinas Sosial Dukcapil telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 71,96%, dengan efisiensi anggaran sebesar 9,98%.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, diantaranya sarana dan prasarana serta SDM panti yang belum memadai, dukungan anggaran yang belum sejalan dengan peningkatan target.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta UPTD Lingkup Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi serta stakeholder yang terkait.
2. Optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial
3. Memaksimalkan perencanaan dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Jambi, 30 Maret 2023  
Kepala Dinas,  
  
**ARIEF MUNANDAR, SE**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19670307 199903 1 004